

BAB 4

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Data Hasil Penelitian

4.1.1 Diplomasi Publik

Umumnya diplomasi publik dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat global baik di luar maupun di dalam negeri terkait dengan kebijakannya. Pemahaman demikian justru menghilangkan partisipasi publik atas diplomasi karena publik hanya dimaknai sebagai target. Oleh karena itu, diplomasi publik perlu dikonsepsikan ulang sesuai dengan perkembangan jaman di abad 21 ini. Filosofi, strategi, dan taktik diplomasi publik bergeser dari informasi searah menjadi dua arah dan interaktif dengan publik. Pertukaran dan timbal balik informasi menjadi sarana membangun kepercayaan dengan menambahkan dimensi personal dan sosial pada variabel-variabel pengaruh dan persuasi. Tujuan akhirnya adalah membangun simpati dan komitmen yang konsisten di masyarakat global, hubungan masyarakat global dengan pemerintah, perusahaan dan satu sama lain (Snow & Taylor, 2009).

4.1.1.1 Diplomasi Publik Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah membentuk Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Luar Negeri di bidang informasi dan diplomasi publik;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan diplomasi publik;
4. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.
4. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di

dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

4.1.2 Diaspora

Diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno "διασπορα" yang berarti penyebaran atau penaburan. Mulanya istilah Diaspora digunakan oleh orang-orang Yunani untuk merujuk kepada warga suatu kota kerajaan yang bermigrasi ke wilayah jajahan dengan maksud kolonisasi untuk mengasimilasi wilayah itu ke dalam kerajaan. Dalam konteks pergerakan manusia, diaspora merujuk pada penduduk yang menetap di negara lain karena berbagai faktor, misalnya perang atau mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam perkembangan globalisasi, diaspora menjadi kekuatan ekonomi baru bagi sebuah bangsa. Jika dahulu mereka disebut sebagai perantau, maka istilah tersebut mulai bergeser dengan istilah diaspora (Indonesian Diaspora Network, 2014).

4.1.2.1 Diaspora Indonesia

Bagi penggagas *Indonesian Diaspora Network* (IDN) Dr. Dino Patti Djalal, istilah Diaspora Indonesia sendiri memiliki arti warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan terbagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah WNI yang tinggal di luar negeri yakni masih memegang paspor Indonesia secara sah; kelompok kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia.

Sementara bagi warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori ketiga. Dan kelompok yang terakhir adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Paul Wolfowitz, yang fasih berbahasa Indonesia disebut Dr. Dino Patti Djalal sebagai salah satu contoh kelompok yang keempat. Jika keempat kelompok ini digabungkan, jumlah Diaspora Indonesia

diperkirakan mencapai delapan juta orang (Indonesian Diaspora Network, 2016).

Bentuk badan diaspora Indonesia saat ini belum terstruktur dengan baik karena masih terpecah menjadi 3 bentukan, dan baru satu yang memiliki badan hukum (berbentuk yayasan). Ketiga bentukan itu adalah:

Indonesian Diaspora Network – Global (IDN-Global)

IDN Global merupakan sebuah jejaring yang memfasilitasi suara dari komunitas-komunitas diaspora yang tersebar menjadi 74 chapter national dan lokal yang jumlahnya terus meningkat. IDN Global juga berfungsi sebagai perantara, pembantu dan perwakilan atas anggota-anggotanya dalam kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah dan swasta di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan Indonesia. Struktur IDN Global dapat dilihat sebagai berikut:

Indonesia Diaspora Network Global (2015-2017)	
<i>Executive Board</i>	
• President:	Ebed Litaay (Europe)
• Vice-President region 1:	Ali Musthofa (Middle East & Africa)
• Vice-President region 2:	Rudolf Wirawan (Australia & Oceania)
• Vice-President region 3:	Dede Deyantono (East Asia)
• Vice-President region 4:	Gerald Eman (ASEAN)
• Vice-President region 5:	Benyamin Rasyad (IDF, IDBC, IDBB)
• Vice-President region 6:	Djoko Waluyu (America)
• Secretary General:	Yenni Thamrin (East Asia)
• Secretary 1:	Basuki Endah Priyanto (Europe)
• Secretary 2:	Joko Supriyanto (America)
• Treasurer General:	Monique Natahusada (ASEAN)
• Treasurer 1:	Lukman Setiyawan (M. East & Africa)
• Treasurer 2:	Sophie Soejitno (Australia & Oceania)
<i>Jakarta representation</i>	
• Executive Director:	Meta Sukma
• Treasurer:	Helen Le Touzey
• Advisor:	Achmad Aditya

Board of Advisors	
• Chairman	Dino Patti Djalal (Indonesia)
• Member	Edward Wanandi (USA)
• Member	Sehat Sutardja (USA)
• Member	Iwan Sunito (Australia)
• Member	Chairul Tanjung (Indonesia)
• Member	John Riady (Indonesia)
• Member	Edwin Soeryajaya (Indonesia)
• Member	Fify Manan (USA)
• Member	Chairul Anhar (Malaysia)
• Member	Johnny Harjantho (Singapore)
• Member	Mahdi Musa (Qatar)
• Member	Mohammad Al Arief (USA)
• Member	Frans Simarmata (Australia)
Board of Trustee	
• Chairman	Dino Patti Djalal (Indonesia)
• Members	All chairs of national chapters

Gambar 4.1 Struktur Indonesian Diaspora Network Global

Sumber: Diolah Peneliti

Indonesian Diaspora Business Council (IDBC)

IDBC merupakan organisasi non-profit yang membantu pertumbuhan berkelanjutan dan pendidikan dalam sektor ekonomi di Indonesia melalui hubungan bisnis dengan bantuan diaspora Indonesia. Hadirnya IDBC ini terinspirasi oleh Kongres Diaspora Indonesia pertama yang diadakan di kota Los Angeles pada tahun 2012. Misi dari IDBC adalah:

- Untuk membantu dan menghubungkan diaspora Indonesia berkembang dalam karir, bisnis, dan kewirausahaan.
- Untuk mempromosikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membuka pintu kesempatan bisnis dan profesional bagi diaspora Indonesia.

- Untuk menjembatani bisnis diaspora Indonesia di luar negeri dengan bisnis di Indonesia.

Indonesian Diaspora Business Council ini diawaki oleh Edward Wanandi sebagai Chairman, Fify Manan sebagai President dan Patricia Wanandi sebagai Treasurer. Keanggotaan IDBC terbuka bagi seluruh bisnis yang dimiliki oleh diaspora Indonesia. Keuntungan menjadi member IDBC dengan biaya keanggotaan 100 dollar Amerika per tahun adalah akses penuh atas semua acara yang diadakan oleh IDBC, IDBB, IDF, dan IDN Global (Indonesian Diaspora Business Council, 2016).

Indonesian Diaspora Foundation (IDF)

IDF adalah sekelompok orang Indonesia yang tersebar di penjuru dunia yang memiliki fokus untuk meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan dunia secara sosial, ekonomi, dan budaya, serta dengan fokus khusus untuk meningkatkan kemampuan teknologi untuk mengembangkan sektor pendidikan. Yayasan ini terdaftar secara hukum di Amerika Serikat sebagai organisasi non-profit dengan misi-misi filantropis. Oleh karena itu, IDF tidak terlibat kegiatan-kegiatan dan lobi-lobi politik. IDF atau Yayasan Diaspora Indonesia merupakan sarana bagi kegiatan-kegiatan amal dan kemanusiaan yang dilakukan diaspora dengan fokus di sektor pendidikan serta pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan. IDF berbasis komunitas, sukarela, dan merupakan organisasi non-profit yang memiliki visi atas peningkatan peran diaspora Indonesia di seluruh dunia dalam memberikan dampak positif dalam sektor sosial dan ekonomi. Peningkatan peran ini tidak hanya dilakukan di komunitas tempat diaspora bermukim, tapi juga untuk Indonesia, antar seluruh diaspora, dan untuk dunia (Indonesian Diaspora Foundation, 2014).

Tim yang terlibat dalam IDF ini dapat dilihat melalui gambar berikut:

Board of Advisors

- **Dr. Dino Patti Djalal (Former Indonesian Ambassador to the US)**
- **Imron Cotan (Indonesian Ambassador to China)**
- **Syamsi Ali (Diaspora Muslim Scholar & Imam)**
- **Tanos TG**

Board of Directors

- **Sonita Lontoh (Silicon Valley Technology Executive & Angel Investor)**
- **Grace Tahir (Director of Mayapada Hospital & Co-Founder of PilihDokter)**
- **Ismail Budhiarso (Founder of Cerdas Foundation)**
- **Christian Tan (Senior Auditor)**
- **Benyamin Rasyad (CEO of Star Source LLC)**

Team

- | | |
|----------------------------------|--|
| • President | Benyamin Rasyad |
| • Secretary of the Board | Adjat Sudrajat (Aerospace Engineer) |
| • Secretary-General | Ariana Alisjahbana (UC Berkeley) |
| • Treasurer | Dr. Amang Sukasih (Senior Statistician) |
| • Treasurer | Dewi Masfar (Indonesian Embassy) |
| • Program Dir. Fundraising | Nira Bagoes |
| • Program Dir. Computer | Dara Yusilawati (Diplomat) |
| • Program Dir. One-on-One | Wieke Kodri (Auditor) |
| • Program Dir. Diaspora-Diaspora | Hani White (Program Manager) |
| • Program Liaisons | Daliana Suryawinata |
| • Program Liaisons | Florian Heinzelmann |
| • Coordinator, Fundraising | Daisy Looho |
| • Coordinator, Fundraising | Anita Djajadiningrat (Women Int'l) |
| • Coordinator, Computer | Annisa Budiman (Consultant) |
| • Volunteer, Strategy | Junaedy Liem (Finance Professional) |
-

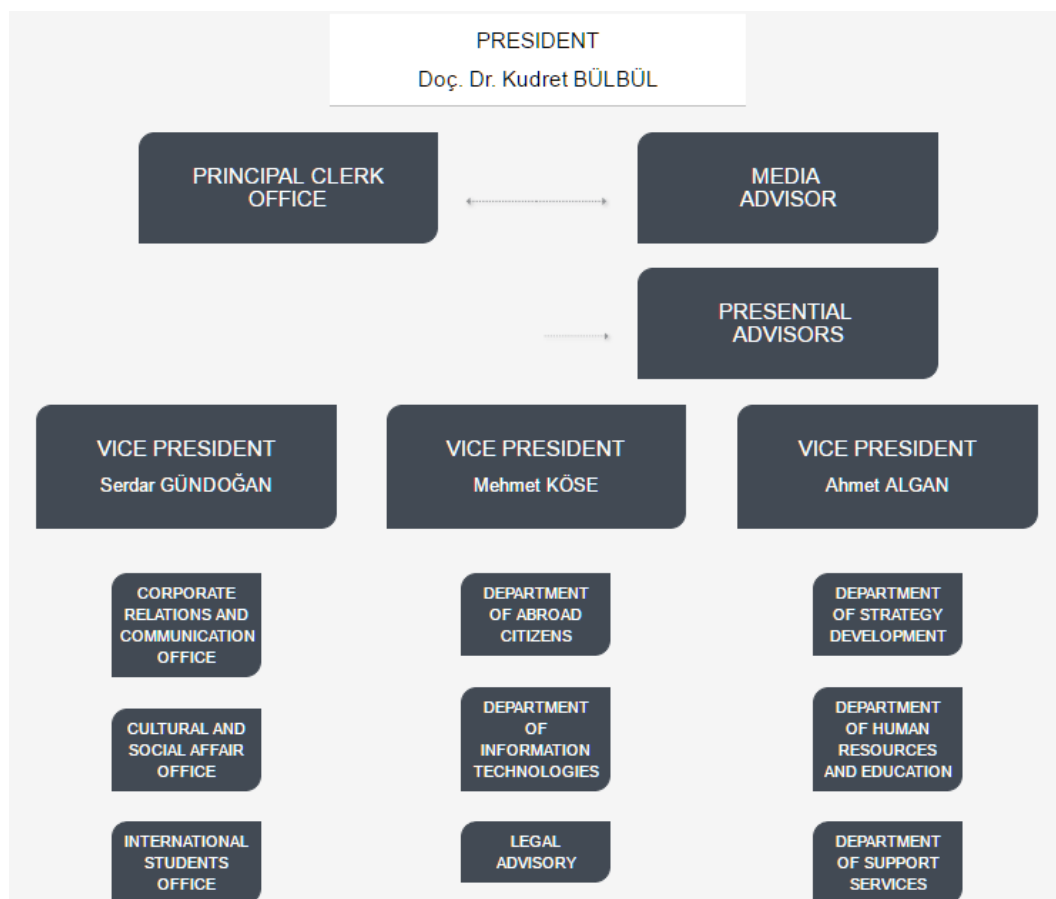
Gambar 4.2 Struktur IDF

Sumber: <http://www.id-foundation.org/>

Bagan-bagan di atas memperlihatkan posisi eksekutif dan staff Indonesia Diaspora Network Global sebagai salah satu hasil dari kongres diaspora ke-3 yang diadakan pada Juli 2015. Selain IDN Global, dapat dilihat juga struktur dari IDBC dan IDF

4.1.2.2 Diaspora Turki

Sejak 6 April 2010, pemerintah Turki membentuk badan yang secara spesifik mengurus diaspora Turki dengan nama YTB (Yurtdışı Türkler Board). Badan ini berhubungan langsung dengan Perdana Menteri dan berkomitmen dalam pemberdayaan dan pengorganisasian peran diaspora Turki dalam bidang sosial-ekonomi, budaya, dan politik di negara tempat bermukim serta dalam tatanan global (Ünver, 2013).



Gambar 4.3 Struktur Badan Diaspora Turki (YTB)

Sumber: <https://www.ytb.gov.tr/>

Berdasarkan struktur badan tersebut, dapat dilihat bahwa badan diaspora Turki dipimpin oleh Presiden YTB dengan dibantu 3 wakil presiden yang masing-masing membawahi 3 departemen. Kesembilan departemen tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) *Corporate Relations and Communication Office*

Kantor ini mengadakan kajian bersama dengan NGO (organisasi non-pemerintah) mengenai isu-isu yang terkait dengan warga Turki yang bermukim di luar negeri, keturunannya, komunitas-komunitas yang memiliki hubungan sejarah, budaya, dan peradaban dengan Turki, serta pelajar-pelajar Turki di luar negeri. Organisasi non-pemerintah diberikan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan studi dan kegiatan agar lebih profesional. Bantuan pendanaan juga diberikan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi organisasi non-pemerintah dalam pengembangan sektor sosial dan membangun citra Turki yang baik di negara-negara lain.

b) *Cultural and Social Affairs Office*

Turki memelihara hubungan baik dengan negara-negara dan komunitas yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah dengan Turki. Kantor ini mengadakan studi-studi dengan negara-negara dan komunitas tersebut terkait dengan penyusunan dan dukungan atas kerjasama dalam sektor sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Turki mempererat hubungan dengan keturunan-keturunannya dan komunitas-komunitas yang tersebar luar dari Asia Tengah hingga Balkan, dari Timur Tengah hingga Afrika, dan memperkuat keterikatan yang berdasarkan kesamaan sejarah, budaya, dan peradaban. Dengan demikian, terpeliharanya sejarah dan identitas budaya Turki, serta pengembangan kerjasama atas kedua hal tersebut dapat tercapai.

c) *International Students Office*

Turki kini telah menjadi tempat tujuan untuk pendidikan dengan berdirinya universitas-universitas ternama dan pusat-pusat penelitian

berkualitas internasional berbasis sosial dan budaya. Beasiswa Turki (*The Turkey Scholarships*), yang dikenal dunia internasional sebagai program beasiswa pendidikan di Turki, memfasilitasi pelajar-pelajar dari ratusan negara dengan strukturnya yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan jaman. Pintu Turki terbuka lebar bagi seluruh dunia yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan melalui jalur Beasiswa Turki ini. Kantor ini telah berhasil membantu pelajar-pelajar yang menempuh pendidikan di Turki hingga selesai sekaligus menjaga hubungan baik dengan alumni-alumninya. Beasiswa Turki (*The Turkey Scholarship*) merupakan citra baru bagi Turki di dunia internasional sebagai salah satu dari sedikit program beasiswa yang tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga membantu dalam proses penerimaan mahasiswa di universitas-universitas Turki.

d) *Department of Abroad Citizens*

Selama tahun 1960-an, Turki mengikat diri dalam kesepakatan mengenai pekerja migran dari negara Turki dengan negara Jerman dan kemudian negara-negara Eropa lainnya. Banyak orang dari segala penjuru Turki pergi ke luar negeri untuk bekerja. Warga Turki, yang meninggalkan negaranya sebagai diaspora pekerja migran setengah abad yang lalu, telah menjadi penduduk permanen di negara tempat bekerja mereka dan banyak yang telah memiliki peran penting di negara tersebut. Sekarang diperkirakan 6,5 juta diaspora Turki yang memiliki kisah sukses di bidang seni, perdagangan, pendidikan, dan politik di negara tempat mereka bermukim. Terkait hal ini, kantor ini mengadakan kajian-kajian pendukung mengenai kesetaraan dalam partisipasi dan keterlibatan diaspora Turki dalam masyarakatnya, meningkatkan efisiensi mereka dalam bidang budaya dan pendidikan, serta pengembangan kesadaran sosial diaspora Turki dan kemampuan mereka untuk bertindak secara bersama-sama. Kajian-kajian yang diselenggarakan dalam rangka Visi Turki 2023 ini disadari sebagai cara melestarikan identitas budaya diaspora Turki, pengembangan kapasitas partisipasi mereka, hingga akhirnya dapat menjadi masyarakat sipil yang efektif.

e) *Department of Information Technologies*

Kantor ini memastikan pemenuhan kebutuhan YTB akan perangkat-perangkat lunak dan keras, serta layanan teknologi informasi lainnya guna memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari perangkat dan layanan tersebut dengan penggunaan yang efisien. Departemen Teknologi Informasi ini juga menyiapkan infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan YTB, serta menyelenggarakan kegiatan komputasi terkait perangkat lunak dan instalasi jaringan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap departemen dalam YTB. Sistem yang ada disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga pada akhirnya dapat disejajarkan dengan perusahaan dan organisasi bertaraf internasional lainnya.

f) *Legal Advisory*

Kantor ini berisikan pengacara-pengacara dan praktisi hukum yang ahli dan tidak hanya memiliki pengetahuan atas hukum-hukum dalam negeri tetapi juga pengetahuan atas hukum internasional dan hukum negara-negara tempat diaspora Turki bermukim. Selain itu, mereka juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang berisikan informasi-informasi yang dapat membantu kegiatan dan bisnis para diaspora Turki melalui perbandingan efektifitas undang-undang terkait diaspora Turki dengan hukum di negara tempat diaspora Turki bermukim.

g) *Department of Strategy Development*

Kantor ini menyelenggarakan kajian-kajian mengenai perencanaan dan manajemen strategis terkait dengan kegiatan-kegiatan YTB. Departemen Pengembangan Strategi memiliki tugas untuk menentukan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan jangka menengah dan panjang YTB berskala nasional, program tahunan, program pemerintah, serta menyusun rencana strategis dalam pencapaian strategi tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki tugas-tugas lain untuk mempersiapkan program pendanaan dan analisis performa kantor pusat, sebagai kontrol internal

YTB, sebagai kontrol awal kebijakan finansial YTB, dan menangani kegiatan-kegiatan akuntansi termasuk finalisasi dan pelaporan.

h) *Department of Human Resources and Education*

Sebagai bagian dari tugas utama kantor ini untuk mengkaji perencanaan sumber daya manusia YTB dan pengembangannya, kegiatan yang diselenggarakan Departemen Sumber Daya Manusia dan Pendidikan meliputi pembuatan kajian mengenai sumber daya manusia, rencana pengembangannya, dan peraturan kepegawaian, menyusun proposal terkait pengembangan sistem kepegawaian dan evaluasi kinerja, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dan calon pegawai, mempersiapkan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan YTB, menyelenggarakan fasilitas perpustakaan, koordinasi dengan departemen lain dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dengan badan/instansi pemerintah lain sesuai dengan mandat dari YTB.

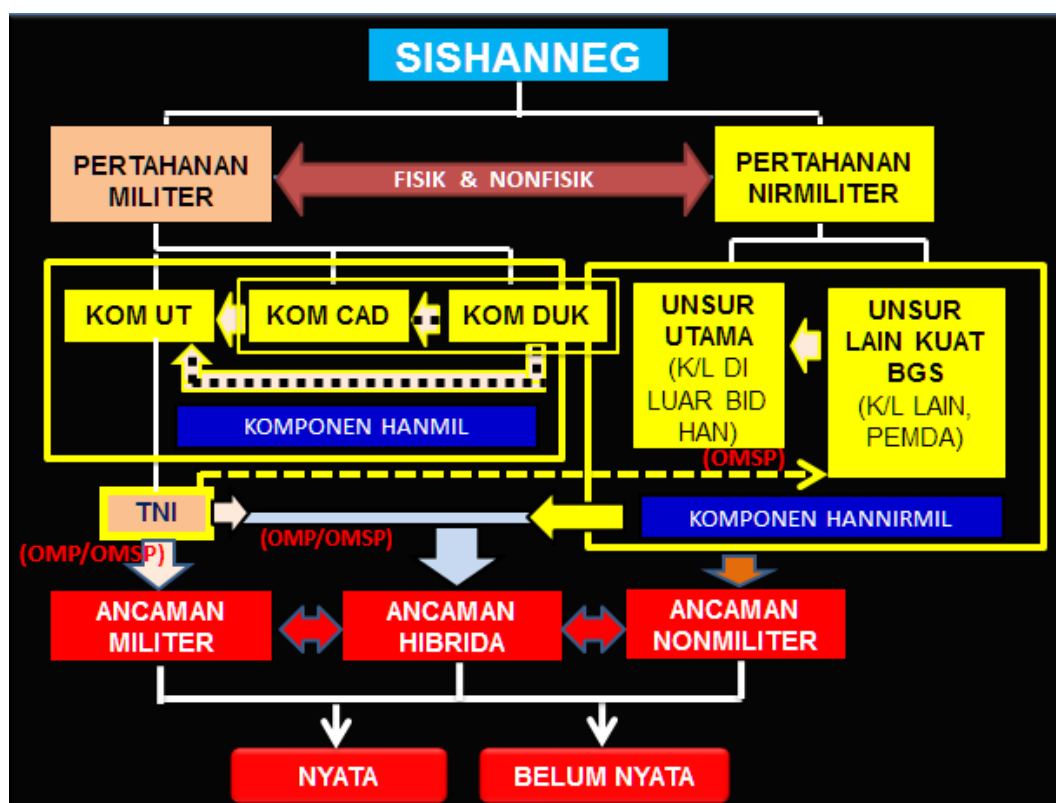
i) *Department of Support Services*

Tugas-tugas utama kantor ini sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah menyelenggarakan kegiatan lelang dan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan YTB, melakukan pemeliharaan atas kebersihan, pencahayaan, temperatur ruangan, perbaikan, transportasi dan jasa-jasa lainnya yang dibutuhkan, menyelenggarakan fungsi pengarsipan YTB, merencanakan dan menyelenggarakan fungsi pertahanan sipil dan mobilisasi dalam YTB, merencanakan dan melaksanakan kegiatan YTB seperti simposium, seminar, konferensi, diskusi panel, workshop, rapat, kunjungan, dan lain sebagainya untuk masyarakat.

4.1.3 Sistem Pertahanan Negara Indonesia

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana

prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.



Gambar 4.4 Sistem Pertahanan Negara RI

Sumber: Presentasi Dirjakstra Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, 2016

Tatanan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan

memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas pertahanan negara. Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

4.1.3.1 Pertahanan Nirmiliter Indonesia

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter disebut dengan "pertahanan nirmiliter". Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan. Pertama, pembentukan instansi vertikal Kemhan di daerah untuk menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah. Kedua, optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi. Ketiga, pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional

dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan. Keempat, penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar K/L dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini. Kelima, pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan untuk efektivitas, efisiensi, dan responsif kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).



Gambar 4.5 Komponen Pertahanan Nirmiliter

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015

Pemberdayaan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman, didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa. TNI sebagai Unsur Lain

Kekuatan Bangsa dipersiapkan secara terpadu untuk mendukung K/L dan Pemda dalam pertahanan nirmiliter.

Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Unsur Utama terdiri atas K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Unsur Lain Kekuatan Bangsa terdiri atas K/L bidang pertahanan, termasuk TNI serta segenap kekuatan bangsa lain yang berperan mendukung efektivitas dan efisiensi tugas-tugas Unsur Utama dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter.

Postur pertahanan nirmiliter terdiri atas Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang disusun dan ditata oleh K/L di luar bidang pertahanan. Penataan Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa secara terpadu dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter. Unsur Utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L sebagai leading sector dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Unsur Utama disusun dalam bentuk kekuatan, kemampuan, dan gelar. Kekuatan Unsur Utama yang disiapkan oleh K/L disesuaikan ancaman nonmiliter yang dihadapi dan bersinergi dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya. Unsur Utama menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sekaligus menjamin sinergisme antara pertahanan militer dan nirmiliter dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pengembangan kemampuan Unsur Utama K/L pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan

ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

1. Kemampuan Kewaspadaan Dini

Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa.

2. Kemampuan Bela Negara

Bela Negara merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemampuan bela negara itu hakikatnya kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara. serta kesediaan berkorban membela negara. Setiap warga negara diarahkan untuk memiliki nilai-nilai bela negara, berupa: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

3. Kemampuan Diplomasi

Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang mengimplementasikan kebijakan politik negara. Diplomasi dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara, yang diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Diplomasi juga digunakan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam menyelesaikan setiap konflik antar negara.

4. Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan iptek dikembangkan untuk mendukung pertahanan nirmiliter. Kemampuan penguasaan teknologi secara umum dapat meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter, melalui penguasaan teknologi kedirgantaraan, kelautan, dan keantariksaan secara terbatas dengan pemanfaatan teknologi satelit, siber dan penguasaan teknologi modern lainnya dalam mendukung pertahanan negara.

5. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi diupayakan sampai pada tingkat pertumbuhan yang memadai, berdaya saing, dan mampu menyejahterakan rakyat secara merata. Usaha-usaha ekonomi harus dapat mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan, yang menjadi penopang kepentingan pertahanan.

6. Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan sosial ini juga menjamin keselamatan warga negara dari berbagai bencana. Perwujudan kemampuan sosial dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketaatan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi pertahanan negara. Selain itu, peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik dioptimalkan dalam mendukung implementasi kemampuan sosial untuk keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara.

7. Kemampuan Moral

Kemampuan moral diaktualisasikan melalui komitmen kebanggaan sebagai warga negara, percaya akan masa depan bangsa yang lebih baik, setia kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai

kebangsaan, serta menegakkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Disamping itu, kemampuan moral juga diarahkan untuk membangun keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

8. Kemampuan Dukungan Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana dan wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan maupun pertahanan. Pengembangan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan yang disinkronisasikan kepada seluruh wilayah secara proporsional dan seimbang guna mencapai hasil yang optimal (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Keterkaitan Diaspora, Diplomasi Publik, dan Pemerintah Indonesia

Diplomasi merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri. Sebagai contoh untuk meningkatkan hubungan perdagangan, jika diaspora dianggap melakukan diplomasi, definisi diplomasi harus disesuaikan (Makarim Wibisono, wawancara, 2016). Pergeseran pemahaman akan diplomasi publik menggambarkan posisi diaspora sebagai *non-state actor* yang mampu menjalin dan menjaga hubungan, bukan sekedar nama, baik negara asalnya. Namun demikian, situasi terkait diaspora, diplomasi publik, dan pemerintah Indonesia saat ini harus dipahami terlebih dahulu.

4.2.1.1 Kondisi Diaspora Indonesia

Diaspora Indonesia dengan bentukannya yang sekarang ini sesungguhnya belum terdefiniskan dengan jelas. Kementerian Luar Negeri sendiri mengakui bahwa mereka belum bisa mendeskripsikan diaspora karena implikasi yang mengikutinya akan banyak. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan kementerian teknis terkait. Menurut Kemlu, diaspora Indonesia meminta penggolongan dan fasilitas khusus

karena mereka (diaspora) adalah orang Indonesia dengan identitas WNA. Dirjen Imigrasi misalnya, tidak menggunakan istilah diaspora namun disebut dengan ex-WNI dan pihak Imigrasi sudah punya peraturan tentang ex-WNI. Jika dibandingkan dengan Cina yang program diasporanya sudah berlangsung ratusan tahun dan terpetakan dengan baik, misalnya dengan program adopsi anak-anak Cina di negara lain, pengkonsepan kebijakan terkait diaspora Indonesia sendiri bersifat reaktif, bukan perencanaan. Ini memang dipicu oleh keinginan diaspora Indonesia untuk di-*acknowledge* (Kementerian Luar Negeri, wawancara, 2016).

Istilah diaspora, menurut Kemlu, lekat dengan persebaran orang-orang Yahudi (Israel). Pihak Kemlu awalnya ragu akan penggunaan istilah diaspora yang diajukan komunitas diaspora paska kongres pertama karena, menurut Kementerian Luar Negeri, istilah diaspora lekat dengan Yahudi (Kementerian Luar Negeri, wawancara, 2016).

Oleh sebab itu, pembatasan mengenai diaspora Indonesia masih didasarkan kepada pendapat beberapa pihak, termasuk diaspora itu sendiri. Menurut Makarim Wibisono, diaspora merupakan orang-orang Indonesia yang sudah lama meninggalkan tanah air dan mengembangkan kariernya, mengembangkan cipta, karsa, dan karya di luar negeri. Meskipun selama di luar negeri mereka sudah lama menjalani hidup, masih ada kelekatan hati terhadap tanah air (Makarim Wibisono, wawancara, 2016).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Dino Patti Djalal, insiator kongres diaspora Indonesia pertama, menegaskan bahwa diaspora adalah orang yang meninggalkan wilayah negaranya dan berada di luar wilayah negaranya tetapi bukan turis, harus menetap atau bekerja, secara permanen ataupun sementara. Batasan diaspora Indonesia sendiri menurut saya pribadi adalah orang Indonesia yang berpaspor Indonesia yang berada di luar negeri, ini termasuk TKI dan orang-orang yang sedang bekerja atau jadi residen di negara lain tapi tetap berpaspor Indonesia namun memang tetap dibutuhkan penggolongan. Jadi pertama,

diaspora adalah semua orang yang punya status WNI dan berada di luar negeri (non-wisata), kedua adalah orang Indonesia yang telah menjadi warga negara lain (*naturalized citizens*), bisa *1st generation*, datang kesana, jadi WNA, kemudian berketurunan dan anaknya ikut kewarganegaraan orangtuanya dengan paspor negara itu, tapi tetap dihitung diaspora Indonesia. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah kalau sudah turun temurun masih tetap dihitung diaspora? Dino Patti Djalal menambahkan bahwa itu tetap dihitung (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, keturunan orang Indonesia yang ada di Madagaskar, dengan jumlah 23 juta orang dan 60% berdarah Indonesia (etnis Jawa) tetap dianggap diaspora Indonesia meskipun kategorinya agak berbeda. Kemudian berikutnya, jika ada perempuan Indonesia menikah dengan misalnya lelaki Amerika, memiliki anak berdarah campuran, anak itu tetap dihitung diaspora, karena memiliki darah Indonesia. Dalam kasus seperti ini Dino Patti Djalal memberikan batasan bahwa sampai keturunan ke-3 masih terhitung diaspora. Lebih lanjut lagi, suami orang Indonesia tadi (orang Amerika) pun bisa dihitung diaspora secara budaya jika tidak mungkin secara hukum. Nanti ketika Indonesia memiliki undang-undang dwi kewarganegaraan, mungkin suaminya tidak akan terhitung warga negara Indonesia namun tetap dianggap sebagai diaspora atau ekstensi diaspora karena diasumsikan berbudaya Indonesia atas pernikahannya dengan perempuan Indonesia. Dengan demikian diaspora secara luas dapat dimaknai sebagai semua orang yang berdarah dan berbudaya Indonesia yang berada di luar Indonesia, apapun kewarganegaraannya (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

Saat ini ada sekitar 6 juta orang berkewarganegaraan Indonesia yang tergolong sebagai diaspora, dengan tambahan kategori lain jumlah ini dapat meningkat menjadi 8 juta orang (Ebed Litaay, wawancara, 2016). Akan tetapi, angka tersebut merupakan hasil perhitungan kasar karena pendataan yang akurat atas jumlah diaspora sulit dilakukan. Kesulitan ini

pertama disebabkan oleh baru munculnya kesadaran akan pentingnya pendataan ini, khususnya dari pihak pemerintah Indonesia. Kedua, Kemlu juga mengakui bahwa hampir tidak mungkin mendata diaspora 100%. (Kementerian Luar Negeri, wawancara, 2016). Hal ini dikarenakan lapor diri ke kedutaan atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri bukan merupakan kewajiban kecuali untuk pegawai negeri, TNI, dan aparatur negara karena menggunakan paspor dinas (Hasjim Djalal, wawancara, 2016).

Sebelum diinisiasi oleh Dino Patti Djalal yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, diaspora Indonesia non-TKI seperti berada di bawah radar. TKI menjadi perhatian karena menyumbang devisa bagi negara. Pemerintah belum menyadari kehadiran dan keinginan diaspora Indonesia untuk berbakti kepada RI. Diaspora, khususnya yang telah berganti kewarganegaraan, bahkan dianggap sebagai pengkhianat (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

Meskipun kurang perhatian pemerintah, diaspora Indonesia memang memiliki kecintaan tersendiri pada tanah air. Diaspora Indonesia memiliki nasionalisme yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Contohnya, jika dibandingkan dengan Korea yang ketika menetap di negara lain justru meninggalkan identitasnya (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016). Keunggulan lain dari diaspora Indonesia adalah menjunjung tinggi tata krama, ramah, memiliki kreatifitas tinggi, dan di beberapa negara juga mudah beradaptasi dengan budaya lokal. Secara latar belakang budaya, diaspora Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beragam sehingga banyak yang bisa orang ketahui tentang Indonesia (Ebed Litaay, wawancara, 2016).

Selain beberapa keunggulan dibandingkan negara lain, diaspora Indonesia juga memiliki kekurangan yang mungkin dilatari nilai-nilai kesopanan yang dianut bangsa Indonesia (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016). Diaspora Indonesia terkadang pemalu, kurang asertif, dan terbiasa dengan kenyamanan pergaulan sesama diaspora Indonesia sehingga

agak membutuhkan waktu lama untuk membuka diri dengan pergaulan setempat (Ebed Litaay, wawancara, 2016)

4.2.1.2 Diplomasi Publik dan Diaspora Indonesia

Penelitian ini membahas tentang diplomasi publik diaspora Indonesia. Oleh karena itu, hubungan diaspora Indonesia dengan diplomasi publik perlu dijelaskan terlebih dahulu. Posisi diaspora Indonesia dalam diplomasi publik juga perlu dipertegas.

Diplomasi publik, umum dipahami sebagai nation-branding, adalah diplomasi yang mengandalkan sisi public relations. Termasuk di dalam diplomasi publik adalah pencitraan, yang bisa mendukung misi substansi dari politik luar negeri. Publik di luar negeri kemudian bisa memahami dan bahkan mendukung kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah. Kebijakan luar negeri yang bagus sekalipun jika tidak dijelaskan ke masyarakat dapat memicu kesalahpahaman dan bahkan muncul pertentangan (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016). Diplomasi publik itu menjelaskan kebijakan luar negeri pemerintah kepada masyarakat, memberikan penjelasan pers, mengadakan diskusi-diskusi dengan mahasiswa dan kelompok akademik yang bisa mengkritisi politik luar negeri dan memberikan input kepada pemerintah (Hasjim Djalal, wawancara, 2016). Diplomasi publik juga dimaknai sebagai diplomasi yang berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk disamping elit juga non-elit (publik). Publik bisa sebagai subjek ataupun objek dari diplomasi publik (Makarim Wibisono, wawancara, 2016).

Kekuatan diaspora sebagai elemen diplomasi publik seringkali diabaikan dalam dunia akademis dan tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya. Diaspora dapat digunakan sebagai sebuah alat dan sebuah target oleh pemerintahnya. Selain itu, diaspora merupakan sebetulnya kekuatan yang mandiri karena mampu melakukan tekanan melebihi pemerintahnya. Hal ini dimungkinkan jika pemerintah asal diaspora memelihara keterikatan diaspora dengan kampung halamannya sehingga

diaspora akan tetap berpihak pada negara kampung halamannya. Lebih lanjut, negara asal diaspora dapat menggunakan diaspora untuk mempromosikan citra positif negara beserta budayanya di negara tempat diaspora bermukim. Sebagai tambahan, diaspora juga dapat menjadi pelobi potensial dalam upaya-upaya pencapaian kepentingan nasional (d'Hooghe, 2015). Dengan pemahaman ini, tidak salah jika dikatakan bahwa pemerintah RI menganggap kegiatan-kegiatan yang dilakukan diaspora Indonesia sebagai diplomasi publik. Kegiatan-kegiatan tersebut bahkan menimbulkan dampak dagang, investasi, modal, dan teknologi (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

4.2.1.3 Pemerintah dan Diaspora Indonesia

Di jaman globalisasi seperti sekarang ini, diaspora sudah perlu dilibatkan secara intensif tidak hanya untuk pencapaian satu tujuan seperti ekonomi, tapi dapat juga untuk pencapaian tujuan politik, tujuan militer, tujuan *security*, dan hal-hal lainnya. Diaspora itu memiliki keterkaitan dengan Indonesia melalui *feeling* ke-Indonesian, itulah yang menjadi modal paling besar diaspora. Dengan kerjasama yang melibatkan diaspora untuk tujuan-tujuan tersebut, diaspora merasa berarti dan rasa rindu terhadap tanah air bisa tersalurkan (Makarim Wibisono, wawancara, 2016). Pemerintah RI mengakui bahwa referensi diaspora dan peluang-peluang kerjasama diaspora Indonesia memang belum seperti diaspora India dan Cina karena diaspora Indonesia masih mencari bentuk. Struktur organisasi IDN Global bahkan belum pernah dipublikasikan (Kementerian Luar Negeri, wawancara, 2016). Dukungan pemerintah RI terhadap diaspora Indonesia dinilai masih minimal. Untuk menangani diaspora Indonesia hanya ditunjuk satu orang staf ahli di Kemlu. Satu orang staf ahli ini tidak bertugas khusus untuk menangani diaspora melainkan menangani tugas-tugas lain sehingga fokusnya terbagi. Akibatnya, banyak urusan terkait diaspora yang terbengkalai karena tidak mungkin satu orang, dengan banyak tugas lain, mampu menangani 6 juta diaspora Indonesia (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

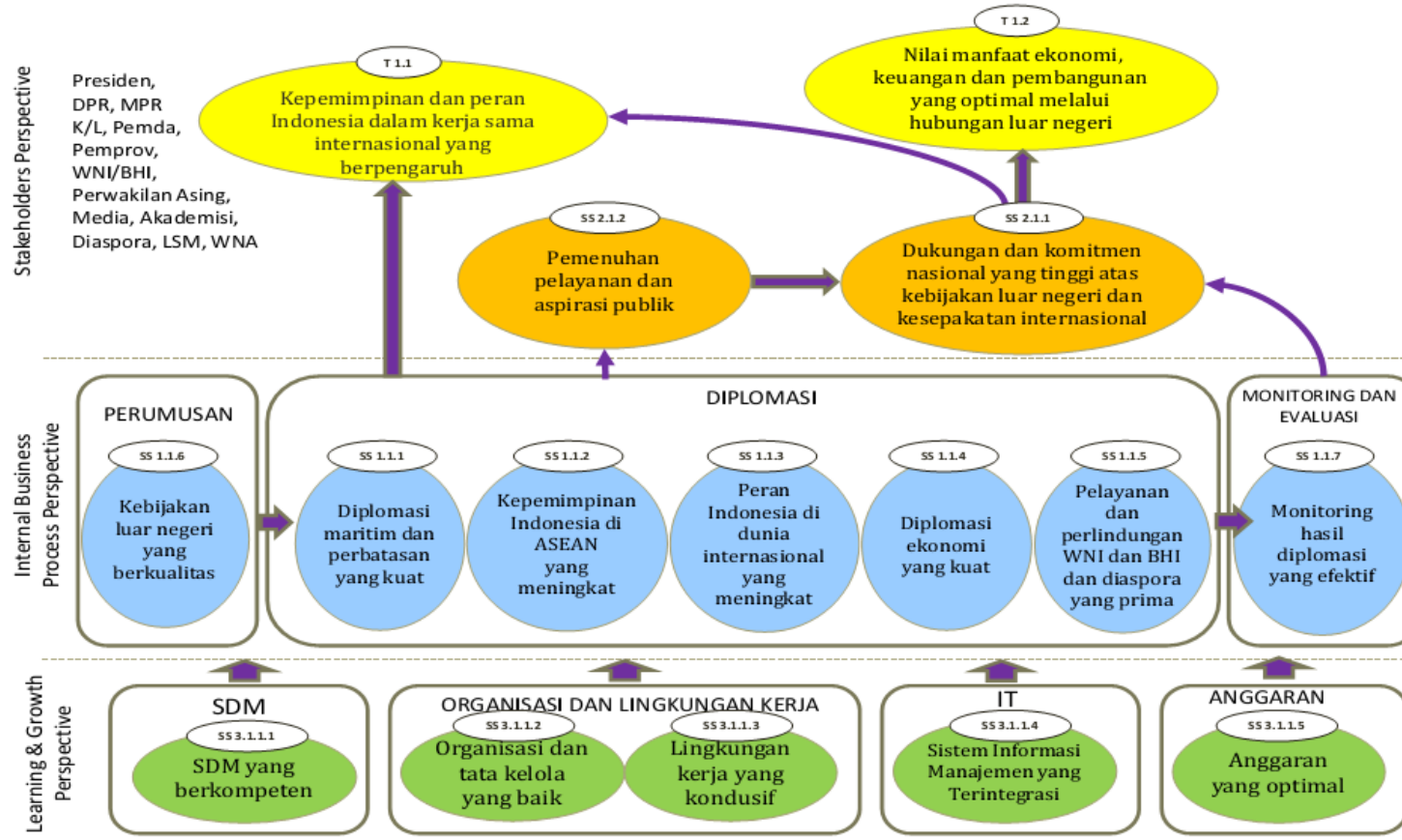
Selama ini, diaspora Indonesia lebih banyak berkegiatan secara mandiri. Koordinasi pemerintah dengan pihak diaspora sendiri hingga saat ini masih belum tertata secara sistematis karena belum ada prosedur yang jelas mengenai pelaksanaan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dan pendataan mengenai jumlah diaspora tersebar secara akurat. Kemlu mengakui peran pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan diaspora Indonesia masih sebatas sebagai penghubung. Kemlu sebagai pihak pemerintah selama ini porsinya hanya sebagai koordinator. Misal dari pihak diaspora Indonesia memiliki proposal kerjasama dan mencari *counterpart* di Indonesia, Kemlu kemudian menghubungkan dengan pihak atau kementerian terkait. Kemlu juga dapat menghubungkan diaspora Indonesia dengan pemerintah daerah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada proposal dari diaspora yang ingin membantu pemerintah untuk menanggulangi sampah di satu daerah dan meminta tolong untuk dicarikan daerah yang mau bekerjasama, saat itu Kemlu mencoba menghubungkan diaspora Indonesia dan daerah terkait sehingga pada akhirnya terwujud bentuk kerangka kerjasama *sister city*. Fungsi Kemlu sebagai penghubung karena dalam tataran pelaksanaan pelaku kegiatan tersebut bukan dari Kemlu namun dari pemerintah daerah dan kementerian terkait. Namun demikian, Kemlu mendukung diaspora Indonesia yang pengorganisasiannya masih berada dalam tahapan awal (Kementerian Luar Negeri RI, wawancara, 2016).

Sebagai tindakan nyata dari dukungan Kemlu terhadap diaspora Indonesia, paska kongres diaspora pertama di Los Angeles pada tahun 2012, Kemlu bekerjasama dengan berbagai kementerian di Indonesia memfasilitasi diadakannya kongres diaspora kedua di Jakarta pada tahun 2013. Kongres ketiga juga difasilitasi oleh Kemlu pada tahun 2015 dan menghasilkan beberapa wacana kebijakan yaitu pemberian kartu khusus dan visa khusus bagi diaspora Indonesia. Kartu Diaspora ini direncanakan akan digunakan sebagai sarana pendataan diaspora. Akan tetapi, kartu khusus diaspora ini belum bisa terealisasi karena ada kebingungan atas target penerima Kartu Diaspora karena diaspora Indonesia belum

terdefiniskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sementara untuk definisi diaspora masih mengikuti pemahaman pihak Imigrasi. Akan tetapi, Kemlu tetap mempertimbangkan perluasan pengertian diaspora terkait dengan keturunan, perkawinan, dan status orang tua (Kementerian Luar Negeri RI, wawancara, 2016).

Diaspora Indonesia merasakan bahwa pemerintah sudah mulai mengapresiasi dan merangkul diaspora meskipun belum secara total. Untuk ke depannya, mereka menginginkan di setiap kota yang ada orang Indonesia atau ada kepentingan Indonesia dibentuk *IDN chapter*, meskipun hanya ada 10 orang Indonesia disana. Kehadiran *chapter* IDN ini bisa lebih efektif dibandingkan konsul honorer. Selama ini orang lokal diangkat menjadi konsul honorer untuk mengurus kepentingan konsulat atau kantor perwakilan Indonesia. Dengan kehadiran *chapter* IDN, konsulat atau kantor perwakilan tersebut tidak perlu lagi mengangkat konsul honorer, cukup memberdayakan *chapter* IDN di kota itu. Akan tetapi, setiap *chapter* itu harus bangun dan enerjik karena selama ini ada beberapa *chapter* IDN yang sudah ada aktif sekali dan ada juga yang tidur. Ketidakaktifan beberapa *chapter* ini karena tidak merasa mendapat perhatian dari pemerintah. Yang diharapkan adalah semua *chapter* bisa enerjik dan bisa bekerjasama dengan tanah air (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

PETA STRATEGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Gambar 4.6 Posisi Diaspora dalam Peta Strategi Kemlu

Sumber: Renstra Kemlu, 2016

Selama ini, tidak ada struktur jelas untuk penanganan diaspora di Kemlu. Hanya ada *desk* diaspora dengan personil yang berganti-ganti. Oleh karena itu, Kemlu berencana membentuk sub-direktorat diaspora di bawah direktorat diplomasi publik, dirjen informasi dan diplomasi publik pada tahun 2017 (Kementerian Luar Negeri RI, wawancara, 2016). Akan tetapi pembentukan sub-direktorat ini dinilai tidak memadai untuk mengurus diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia karena anggarannya sangat terbatas (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016). Harapan besar diaspora Indonesia adalah suatu saat dapat masuk sebagai salah satu pos penganggaran di APBN sekaligus sebagai formalisasi diakuinya diaspora. China dan India memiliki kementerian sendiri untuk pemberdayaan diaspora. Di India, keturunan India pemegang paspor asing dapat memperoleh kartu identitas khusus diaspora yang menjamin persamaan hak dan kewenangan sama dengan pemegang paspor India. Pembentukan badan atau lembaga khusus yang menangani diaspora tidak mudah. Dalam waktu dekat, dapat dimulai dari pengakuan diaspora secara resmi agar ada kejelasan atas kewenangan, hak, dan kewajiban diaspora. Idealnya, lembaga khusus diaspora ini berada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Struktur lembaga dapat diekspansi dan diperinci lebih lanjut karena saat ini hanya bersifat *ad-hoc* dan sukarela. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari dapat ada sistem penggajian. Namun semua itu memerlukan langkah-langkah per tahapan. Diaspora Indonesia menganggap bahwa sekarang yang terpenting adalah apa kebutuhan Indonesia yang bisa dibantu diaspora melalui ragam *task force* yang dimiliki. Karena mimpi besar tidak dapat diwujudkan sekaligus dan harus realistis dengan melalui berbagai tahapan (Ebed Litaay, wawancara, 2016).

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami beberapa poin penting yaitu:

- Pemerintah belum merasa diplomasi publik adalah domain yang penting bagi pencapaian kepentingan nasional.

- Pemerintah belum cukup mengapresiasi inisiatif diaspora Indonesia
- Diaspora Indonesia belum terdefiniskan dengan jelas karena terbentur kerumitan birokrasi.
- Pembentukan lembaga dan kebijakan mengenai diaspora Indonesia terbentur permasalahan dana (APBN)..

4.2.2 Implementasi Diplomasi Publik Diaspora Indonesia

Implementasi diplomasi publik diaspora Indonesia dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 11 *task force* diaspora yaitu Pertumbuhan Hijau, Bisnis dan Investasi, Kuliner, Kedirgantaraan, Kesehatan Masyarakat, Sains Teknologi dan Informasi, Kota Layak Huni, Kepemudaan, Pendidikan, Pekerja Migran, serta Keimigrasian dan Kependudukan. Beberapa kegiatan diaspora Indonesia yang sudah dilakukan melalui berbagai macam *task force*-nya adalah sebagai berikut:

a) Task Force Bisnis dan Investasi

- Melalui IDN *chapter* Perth menyelenggarakan seminar dengan tema “*Starting a Product Based Business*” pada 9 April 2016
- Melalui IDN *chapter* Manila mengadakan kegiatan Temu Perdana Pebisnis dan Profesional Indonesia pada 16 April 2016
- Melalui IDN Amerika Serikat mengadakan *Diaspora’s Biz Session* dengan tema “*Learn What It Takes to Have a Successful Start-up*” pada 29 April 2016
- Melalui IDN China menyelenggarakan kegiatan bersama *Indonesian-China Women Entrepreneurs* dengan tema *Holding Hand to Create a Better World* pada 10 Agustus 2016
- Akan mengadakan *Indonesian Diaspora Business Conference* di Jakarta dengan agenda Kecocokan Bisnis Indonesia dan Pengusaha dari IDN *chapter* di seluruh dunia pada 10 Oktober

2016, diperkirakan 100 usaha kecil dan menengah akan berpartisipasi dalam acara ini.

b) Task Force Pendidikan

- Melalui IDN *chapter* Manila mengadakan kegiatan “Mengenal Indonesia” pada 9, 16, dan 23 April 2016
- Melalui IDN *chapter* Singapura mengadakan penggalangan dana untuk pendidikan anak-anak difabel di Indonesia dengan tajuk “Kebersamaan Penuh Berkah” pada 29 Mei 2016
- Akan mengadakan program pendidikan khusus bernama “*Diaspora Academics*” untuk Papua dan Papua Barat melalui IDN Amerika Serikat.

c) Task Force Energi

- Pembuatan MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk proyek pembangkit tenaga surya bertenaga 100NW dengan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo pada bulan Maret 2016.
- Akan mengembangkan proyek Desa Emas bersama pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya kepada 44000 desa-desa tertinggal di penjuru Indonesia. Dana dari pemerintah untuk proyek ini diperkirakan sekitar 100.000 dolar Amerika per tahun untuk tiap desa. Harapan dari program ini adalah agar kesejahteraan dan peningkatan kualitas air, makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebersihan dapat tercapai dalam jangka menengah dan panjang melalui energi bersih dan murah.

d) Task Force Kuliner dan Budaya

Melalui IDN Belanda, selama 2014 hingga 2016 melakukan kegiatan-kegiatan:

- *Workshop* 30 Ikon Kuliner Tradisional Indonesia dengan dukungan *Chef Vindex Tengker* sebagai pemateri.
- Memberikan sajian *fine dining lunch* kepada Edward Wanandi dan keluarga, beserta anggota-anggota IDN Belanda
- Kursus memasak 15 resep dari 30 Ikon Kuliner Tradisional Indonesia
- Kerjasama dengan *The Hague University of Applied Sciences (Academy of Health, Nutrition, and Dietetics)*
- *Workshop* di *Regional Educational Centre (ROC)* Leiden.
- Mengorganisir Paviliun Indonesia pada festival *Taste of Amsterdam* 2014 hingga 2016
- Katering untuk *Diplomatic Reception* bertema “*The Pride of Indonesian Heritage*” dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69.
- Mengadakan Pesta Rakyat pada tahun 2014 dan 2015.
- Memberikan sajian *fine dining lunch* kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lisbon dalam rangka Kunjungan Perpisahan.
- Menyenggarakan Kompetisi Memasak pada tahun 2014
- Memberikan sajian *fine dining lunch* kepada Dino Patti Djalal dan keluarga, serta anggota IDN Belanda sebagai persembahan dari *Task Force* Kuliner
- Katering untuk acara perpisahan Ibu Retno Marsudi yang melepaskan posisi Duta Besar Indonesia untuk Belanda karena menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
- Demonstrasi masak dalam *Ethnic Food Event*, selama *Horecava*
- Demonstrasi masak pada *Gastronomiebeurs Utrecht*

Melalui IDN Perancis melakukan kegiatan-kegiatan:

- Menyelenggarakan Pameran Budaya dan Kuliner “*Splendid Indonesia*” pada 28 Mei 2016 di Paris, Perancis.
- Akan mempererat hubungan *Task Force* Kuliner Eropa dengan *Task Force* IDN Global agar sejalan dalam tujuan.
- Akan mempererat hubungan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kementerian-kementerian lain atau organisasi-organisasi yang didukung pemerintah Indonesia.
- Akan mempererat hubungan dengan para pemilik restoran Indonesia di Eropa
- Akan mempererat hubungan dengan para pengimpor bumbu dan rempah Indonesia di Eropa
- Akan melanjutkan kerjasama dengan *The Hague University of Applied Sciences (Academy of Health, Nutrition, and Dietetics)* serta kampus-kampus dan lembaga pendidikan lain.
- Akan lebih terlibat dalam berbagai macam festival dan kegiatan kuliner.
- Mempromosikan masakan Indonesia ke seluruh penjuru dunia.

Melalui IDN Amerika Serikat mengadakan rangkaian kegiatan Festival Diaspora Indonesia New Orleans pada 29 dan 30 April 2016. Tim kuliner dalam festival ini dipimpin oleh *Maestro Chef* William Wongso yang mempersiapkan *Gala Dinner* dan Ikon masakan Indonesia, Sate dan Nasi Goreng untuk disajikan dengan Gerobak Jakarta. Selain itu, sepanjang acara dimeriahkan dengan sajian musik tanpa henti dari *genre* pop hingga *hardcore blues* yang ditampilkan oleh artis-artis diaspora dari penjuru Amerika Serikat

antara lain Atiek CB, Rey Wowor, Anto Joewono, Diar, Shakila, Nita Sinaga, 4For6 Los Angeles Band, dan Gugun Blues Shelter.

Melalui IDN Inggris menyelenggarakan kegiatan-kegiatan:

- Bazaar makanan Indonesia bernama *Indotaste London* pada 16 April 2016.
- Bazaar makanan Indonesia, peragaan busana, cerita rakyat, dan pertunjukan gamelan dalam acara *Indonesian Iconic Dishes and Folktales* pada 7 Mei 2016 di Bristol, Inggris.

Melalui IDN Australia menyelenggarakan kegiatan-kegiatan:

- *Harmony Walk* di Blacktown, New South Wales, Australia pada 8 November 2016
- Acara kolaborasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertajuk *Wonderful Indonesia Festival and Travel Fair* pada 30 April 2016
- *Bazaar 2016 Indonesian Multicultural and Harmony Festival* yang menampilkan stand makanan dan Gelar Tari dan Musik Tradisional dan Multikultural oleh IDN *chapter* New South Wales pada 7 Mei 2016
- Pameran kuliner, budaya, dan bisnis dengan nama “Kreasi Indonesia” oleh IDN *chapter* Perth pada Agustus 2016
- Mempromosikan kopi Indonesia di Australia setelah *Tanamera Coffee* berhasil dengan sukses membuat juri internasional terkesan dan memberikan gelar “*Champion International Roaster*” dan “*Champion Filter Coffee*” dalam *Australia International Coffee Award* yang diselenggarakan pada 17 hingga 19 Maret 2016

e) **Task Force Kesehatan**

Indonesian Diaspora Global Network Health (IDGNH) melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yaitu:

- Membuka *The Dutch School for Women with Cancer* yang memberikan pendidikan pencegahan kanker untuk penduduk lokal di Belanda serta pelatihan staf medis serta menyediakan terapi bagi wanita yang mengidap kanker. Lembaga ini telah berdiri selama 7 tahun dan berkolaborasi dengan lebih dari 10 Universitas di Indonesia antara lain Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Sumatera Utara.
- Menyelenggarakan program *Family Medicine or Primary Care Physicians (FM or PCP)* yang dimulai Mei 2016 lalu. Satu tim berisikan 17 pengajar PCP dari beberapa universitas di Indonesia mengikuti *workshop* selama 2 minggu di *Maastricht Medical Center* Belanda dengan pemateri Prof Dr Job Metsemakers, MD Phd FM yang merupakan kepala *European Family Medicine Society*. Berdasarkan kunjungan terakhir Drg. Usman Sumantri, kepala BPPSDMK, beserta sekretarisnya Dr Tancarino, MoU untuk kolaborasi secara penuh sudah disepakati. Untuk ke depannya, diharapkan anggaran untuk kelanjutan program dapat terpenuhi.
- Pendampingan untuk kelanjutan uji coba *Telemedicine* di Indonesia sudah siap dan menunggu kesiapan tim *Telemedicine* Indonesia.
- Menjalankan dan mempersiapkan *Medical Health Care for Common People* yaitu upaya untuk menyediakan pelayanan dan tindakan medis bagi penduduk Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah melalui beberapa aktifitas seperti pengembangan vaksin khusus negara-negara beriklim tropis, hibah alat-alat dan instrumen kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, tindakan ortopedi, pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan khusus lansia, tim bedah plastik dan bedah umum, kanker ginekologi, kanker mulut, pelayanan kesehatan jarak jauh, lepra, kesiapan bencana alam global, akses pelayanan kesehatan bagi penduduk tak terdata, dan lain sebagainya

- Membantu kolaborasi antara Erasmus MC Rotterdam dan LPDP masih dilakukan dan membutuhkan banyak dukungan.
- Membantu pendidikan Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Anestesi untuk penduduk Indonesia melalui Universitas Sumatera Utara dengan kolaborasi penuh dengan *Erasmus Medical Centre Rotterdam*. Akan tetapi, kolaborasi ini dengan terpaksa dibatalkan karena akreditasi USU menurun dari A menjadi B.
- Dalam kunjungan pertama presiden Joko Widodo dan staf ke Belanda, tim *Indonesia Diaspora Global Network Health* yang dipimpin Dr Lukman H Makmum dan Dr Tjay Tan MD PCP bekerja sama dengan tim medis kepresidenan bersiaga selama 24 jam dalam 3 hari.
- Pada akhir Mei 2016, tim yang berisikan dokter gigi dan ahli psikologi untuk Revolusi Mental bagi dokter umum akan bergabung dengan *Indonesia Diaspora Global Network Health*.
- Akan ada tambahan dukungan transportasi alat-alat kesehatan dan perlengkapan medis dari IDN Perancis.
- Terkait dengan *Global Security Health Agenda* pada bulan Oktober 2016 di Belanda, *Indonesia Diaspora Global Health Network* berharap dapat bertemu dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara serius guna membicarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia agar lebih cepat dan lebih baik. Tim *Indonesia Diaspora Global Network Health* juga siap mengorganisir rapat dengan Menteri Kesehatan Belanda serta kunjungan ke *Phillips Company* untuk melihat Rumah Sakit Eindhoven yang merupakan rumah sakit terinovatif di dunia.

f) Task Force Kota Layak Huni

Dengan dikoordinasi oleh Wiwi Tjiook dan Hasti Tarekat dari Belanda serta Daliana Suryawinata dan Pauline Boedianto di Indonesia, task force ini melakukan kegiatan-kegiatan:

- Pembangunan Kampung Nelayan Muara Angke sebagai masterplan Jakarta Utara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk area seluas 50 hektar dalam jangka waktu 2013 sampai dengan 2015.
- Kolaborasi dengan *Wageningen University Belanda* dan Institut Pertanian Bogor untuk studi *participatory* dalam perencanaan lingkungan bidang arsitektur lansekap di area Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat pada tahun 2014.
- Mengembangkan perangkat baru untuk meningkatkan ketahanan desa/kota masa depan di Proto Tamansari, Yogyakarta pada tahun 2014.
- Festival Kreatif Kota Tua 2014 dan 2015 di Jakarta.
- Mengadakan rapat guna pembahasan kemitraan pihak pemerintah dan swasta dengan *Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC)* dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Program KerjaSamaOranye atas *Smart City* Bandung dan Surabaya dengan proyek yang sedang berjalan yaitu *Smart City Hall, Home at Work, Fashion Village*, serta pengembangan daerah Babakan di Surabaya.
- Penandatanganan MoU antara IDN Belanda dan Kabupaten Bangka Barat untuk pengembangan *Muntok Sustainable and Heritage Town* di Den Haag, Belanda pada 3 November 2015. Sekarang yang sedang berlangsung adalah pendampingan di bidang warisan budaya, konservasi, dan perencanaan pengairan dan saluran air terintegrasi.

- *Pilot project* untuk pembangunan Kampung Vertikal Muara Angke dengan 660 unit tempat tinggal dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Partisipasi dalam *International Architecture Biennale Rotterdam 2014* yang bertema “*Urban by Nature*” melalui sesi presentasi proyek Muara Angke pada 29 May 2014.
- Mengadakan seminar *Dutch Indonesia Railway Seminar: Connecting History to The Future* di Utrecht pada 25 November 2014.
- *Expert Meeting* untuk program *Adaptive Re-use of Forts in Indonesia* pada bulan Juni 2015.
- Konferensi *Pan Sumatra Heritage Network* di Sawahlunto, Sumatera Barat pada bulan Oktober 2015.
- Forum Infrastruktur Indonesia – Belanda ke-3 di Den Haag, Belanda pada 30 April 2015.
- Pameran *Industrial Heritage in Sumatra* di Museum Bronbeek, Arnhem, Belanda pada 17 Januari 2016.
- Presentasi atas proyek Muara Angke, Bangunan Dengan Engineering Alami dan Bendungan dengan tema Menghadapi Tantangan Pengembangan Sumber Daya Air di Indonesia melalui Inovasi Teknologi, kolaborasi bersama PPI Delft pada 27 Februari 2016.
- Partisipasi dalam *workshop* yang diselenggarakan oleh *Technical University Delft* dengan tema “*Confronting Informality*” pada 18 Maret 2016.
- Mengadakan *workshop* sebagai persiapan untuk kongres *International Adaptation Futures* dengan tema “*Leading Change in Cities – How will you do it?*” dengan partisipan dari 10 negara

bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Rotterdam pada 9 Mei 2016.

- *Round table meeting* membahas pengembangan Kota Lama Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Leidschendam pada 10 Mei 2016.
- Berkolaborasi dengan Universitas Leipzig, mengadakan penelitian untuk pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi strategi manajemen resiko banjir di Muntok, Bangka Barat yang masih berlangsung hingga sekarang.
- Mempersiapkan Festival Kota Tua 2016 Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2016.
- Mempersiapkan Konferensi Pan Sumatra Heritage Network 2017, sebagai tindak lanjut atas MoU yang ditandatangani oleh IDN Belanda dan Kabupaten Bangka Barat pada 3 November 2015 di Den Haag, Belanda.
- Program Indonesian Waste Platform: Green Moluccas and Eco Flores Foundation yang berfokus pada promosi dan fasilitasi kolaborasi antar sektor untuk solusi atas permasalahan limbah di Indonesia terkait dengan Indonesian Waste Summit yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

4.2.3 Implementasi Diplomasi Publik Diaspora Turki

Implementasi diplomasi publik organisasi diaspora Turki dilakukan dengan dibagi menjadi 4 kategori kegiatan, pertama yang melibatkan diaspora Turki, kedua yang melibatkan pelajar-pelajar internasional di Turki, ketiga yang melibatkan lembaga-lembaga non-pemerintah, dan terakhir yang melibatkan komunitas-komunitas yang masih terkait diaspora Turki. Beberapa kegiatan terbaru organisasi diaspora Turki adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan melibatkan diaspora Turki:

- Dimulainya *term* kedua untuk program magang di institusi dalam negeri Turki bagi diaspora Turki pada tanggal 16 Agustus 2016
- Memberikan dukungan dalam *Values Training Summer School* yang diselenggarakan oleh *Diyamet Center of America* yang memberikan pendidikan Al-Quran, sejarah dan seni Islam, serta sejarah dan literatur Turki pada 2 Agustus 2016
- Mengadakan *Citizens Abroad Advisory Board Public Institutions Meeting* pada 28 Juli 2016 yang membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi diaspora Turki serta pemberantasan *Fetullah Terrorist Organization* (FETO) pimpinan Fetullah Gulen yang mencoba melaksanakan kudeta terhadap pemerintah Turki
- Meluncurkan program pelatihan bahasa Turki selama 8 bulan dengan nama *Public Officials and Academics Turkish Communication Program* (KATIP) dengan partisipan pejabat, akademisi, dan peneliti dari 24 negara pada 24 Mei 2016
- Mengadakan pertemuan bertemakan "*Muslim Community in the USA: Problems, Suggestions and Opportunities*" dengan para ahli di bidangnya pada 29 April 2016
- Untuk ke-8 kalinya, mengundang diaspora Turki yang berprofesi di bidang hukum untuk membahas *International Dimension of Divorce and Social Security Law, Xenophobia dan Fighting Against Discrimination* selama 3 hari mulai tanggal 21 April 2016

b) Kegiatan melibatkan pelajar-pelajar internasional di Turki:

- Mengadakan program nasional Beasiswa Turki
- Buka puasa bersama 250 siswa internasional dari 60 negara pada 23 Juni 2016
- Tes kelancaran bahasa Turki untuk para penerima beasiswa Turki pada 20 Juni 2016
- Mengadakan kunjungan ke Konya bagi 400 pelajar dan mahasiswa Suriah peserta program pelatihan bahasa Turki pada 28-29 Mei 2016 serta 4-5 Juni 2016

- Mempromosikan program Beasiswa Turki dengan berpartisipasi di *NAFSA International Education Fair and Annual Conference*, yang telah diadakan selama 66 tahun di berbagai kota di AS pada 29 Mei - 3 Juni 2016
 - Mensponsori *International Students World Cup* ke-2 dengan peserta 199 tim dari 67 negara yang akhirnya diselenggarakan pada akhir Mei 2016
 - Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan *Yunus Emre Institute* dalam penyelenggaraan program beasiswa Turki pada 18 April 2016
- c) Kegiatan melibatkan lembaga-lembaga non-pemerintah:**
- Penandatanganan MoU dengan *Statistical, Economic and Social Research and Training Center (SESRIC)* yang berada di bawah *Organisation of Islamic Cooperation (OIC)* atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 14 Juni 2016
 - Menerima kunjungan dari jurnalis-jurnalis negara-negara Teluk dan Balkan, Asia Pasifik, Amerika Latin, Uni Eropa, dan Asia Tengah yang sedang menghadiri *World Humanitarian Summit* pada 23-24 Mei 2016
 - Menerima kunjungan mahasiswa *Istanbul University* pada 18 April 2016
 - Menerima kunjungan dari gabungan mahasiswa ilmu sosial di Turki yang tergabung dalam program “*Young Diplomats Academy*” di bawah TUGVA (*Turkey Youth Foundation*) pada 28 April 2014
- d) Kegiatan melibatkan komunitas-komunitas terkait diaspora Turki:**
- Menerima kunjungan 70 tenaga pendidik dari 16 negara peserta program “*Sharing Experiences Among International Educators*” yang diselenggarakan *Istanbul Voluntary Educators Association* pada 19 Juni 2016

- Menerima kunjungan dari Irina Vlah, Gubernur Daerah Otonomi Gagauzia, *Republic of Moldova* beserta delegasi lainnya pada 23 Juni 2016
- Memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan *International Congress of Education, Arts, Humanities and Higher Education leadership in the Asian Community* oleh *Centre for Advanced Studies of Islam, Science and Civilization (CASIS)* di *Malaysian Technological University (UTM)* sebagai bagian dari program inisiatif untuk dukungan dana internasional di kawasan Asia Pasifik pada 29 Juli 2016
- Publikasi riset sejarah Kutadgu Bilig yang merupakan hasil kerjasama YTB, *Kırıkkale University*, dan *Chinese University of Economy and Finance of Xinjiang* pada 16 Mei 2016
- Penayangan film “*The story of Meskhetian Turks*”, bangsa Turki yang dipaksa meninggalkan wilayah Meskhetian oleh tentara Soviet pada tahun 1944, yang dihadiri akademisi, pejabat publik, diplomat, serta undangan lokal dan tamu asing pada 16 Maret 2016
- Kunjungan resmi oleh YTB President Assoc. Prof. Dr. Kudret Bülbül beserta delegasi yang mendampingi ke Prishtine, Kosovo sebagai bagian dari program dukungan untuk Kosovo pada 28 April 2016
- Dalam rangka peringatan 72 tahun deportasi paksa etnis Crimean Tatars dari Crimea, YTB membuat program bernama “*The Crimea’s Historical and Cultural Reminiscences Inventory Analysis*” yang bertujuan untuk mendata dan mengumpulkan artefak sejarah yang rusak dan hancur akibat deportasi paksa tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Diplomasi Publik Diaspora Turki dengan Diaspora Indonesia

Peneliti mencoba membandingkan diplomasi publik diaspora Turki dengan diaspora Indonesia melalui klasifikasi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Diaspora Indonesia dengan Diaspora Turki

Klasifikasi	Diaspora Indonesia	Diaspora Turki
Inisiator	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional • Pengusaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah
Agenda kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar • Festival kebudayaan • Transfer pengetahuan ke dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar • Festival kebudayaan • Menerima kunjungan resmi • Memberikan bantuan finansial • Beasiswa • Merumuskan kebijakan terkait diaspora
Visi dan misi	<ul style="list-style-type: none"> • Melestarikan warisan nilai-nilai Indonesia yang penuh kearifan • Menumbuhkembangkan persaudaraan dengan diaspora Indonesia di seluruh dunia • Menghubungkan sesama diaspora guna memperbaharui dan memperkuat keterikatan dengan Indonesia • Bersinergi dengan Indonesia • Mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang dinamis untuk kesejahteraan bersama dengan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan studi atas diaspora • Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi diaspora dan mencari solusinya • Melakukan kegiatan untuk pengembangan ikatan budaya dan ekonomi untuk komunitas-komunitas sosial kerabat Turki
Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyambut baik inisiatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk badan

pemerintah	diaspora dan menjadi perantara kegiatan antara diaspora dan <i>counterpart</i> di dalam negeri	<p>husus diaspora yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat undang-undang sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan kegiatan YTB
Bentukan	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kelompok dan 1 yayasan berbadan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Satu badan koordinator berskala nasional dan beroperasi dalam lingkup internasional yang bertanggung jawab pada perdana menteri

Sumber: Diolah Peneliti

4.3.2 Diplomasi Publik Diaspora Indonesia sebagai Pendukung Pertahanan Nirmiliter

Sesuai dengan yang tertulis di Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta

dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Pengembangan kemampuan pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan iptek, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Dibandingkan dengan konsep *civilian-based defense* yang diutarakan oleh Sharp (1990), pertahanan nirmiliter Indonesia memiliki kesamaan dalam penekanan penggunaan sumber daya selain militer sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Diplomasi publik yang dilakukan diaspora Indonesia melalui kegiatan-kegiatannya yang dapat dilihat pada subbab 4.2,2 telah berhasil meliputi berbagai aspek kemampuan pertahanan nirmiliter. Meskipun demikian ada potensi-potensi diaspora Indonesia yang jika diberdayakan secara penuh, dapat mendukung seluruh kemampuan pertahanan nirmiliter yang perlu dikembangkan (Sharp, 1990).

Pertama, kemampuan kewaspadaan dini, diaspora Indonesia tersebar di tujuh benua dengan jumlah hampir 8 juta orang. Dengan latar belakang dan lingkungan yang berbeda, mereka menetap di luar negeri untuk berkehidupan dan tetap merasa terikat dengan Indonesia secara emosional. Ikatan secara emosional ini yang membuat beberapa di antara diaspora Indonesia membuat berbagai kumpulan dan komunitas yang sebagian besar menjalin jejaring komunikasi yang sudah cukup mulai berjalan di bawah IDN Global. Jejaring komunikasi dengan cakupan luas ini memiliki potensi besar untuk diberdayakan sebagai kemampuan kewaspadaan dini.

Menurut Makarim Wibisono, diaspora Indonesia banyak yang telah lama bermukim di luar negeri memiliki kemampuan komunikasi yang baik

dengan masyarakat lokal menggunakan dialek-dialek khusus. Kalau kita bisa memanfaatkan diaspora seperti ini, yang bisa dekat dengan masyarakat setempat sehingga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di tempat itu, diaspora kita dapat membantu mengidentifikasi penganut paham-paham ekstrim sebagai *early warning system* dan sekaligus ikut menjaga sesama diaspora agar tidak terbawa ke arah pemahaman ekstrim tersebut (Makarim Wibisono, wawancara, 2016).

Senada dengan beliau, Hasjim Djalal juga menambahkan bahwa dari segi keamanan diaspora Indonesia bisa banyak membantu, misalnya dengan mengidentifikasi orang-orang Indonesia yang terindikasi ekstrim ideologi atau separatis. Sebagai contoh, di Belanda, diaspora dapat mengidentifikasi orang-orang yang merupakan simpatisan RMS, atau di negara-negara Timur Tengah diaspora dapat mengidentifikasi orang-orang yang berasosiasi dengan ISIS. Lebih lanjut lagi, diaspora juga dapat membantu mengidentifikasi orang-orang yang terindikasi dan terkait dengan bisnis di bidang narkoba. Dulu narkoba dan obat-obatan yang masuk ke Indonesia datang dari Bangkok, Thailand. Sekarang ini juga banyak yang berasal dari Afrika, Nigeria, dan Kolombia. Jika informasi itu diserahkan kepada pemerintah kita, dari segi keamanan dan pertahanan bisa sangat membantu sebagai jejaring informasi. (Hasjim Djalal, wawancara, 2016)

Kedua, kemampuan bela negara. Doktrin Pertahanan Negara menyatakan bahwa konsep bela negara memiliki 5 sikap dasar yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan fisik. Menurut Kolonel Oki Yanuar dari Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, kelima sikap dasar tersebut tidak mutlak harus terpenuhi semuanya untuk mengatakan seseorang telah melakukan bela negara. Beliau menekankan bahwa yang terpenting dalam kemampuan bela negara adalah mampu menjaga kinerja dan profesionalisme sebaik-baiknya (Kementerian Pertahanan, wawancara, 2016).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa poin kelima yang sempat menjadi kontroversi di media massa cetak maupun elektronik bukan merupakan halangan seseorang memiliki kemampuan bela negara jika disertai keinginan sungguh-sungguh. Keinginan sungguh-sungguh diaspora Indonesia tersurat dalam Deklarasi Diaspora yang dibacakan dan diikuti seluruh peserta kongres Diaspora pertama di Los Angeles pada 8 Juli 2012 seperti berikut ini.

DEKLARASI DIASPORA INDONESIA

Kami diaspora Indonesia. Kami tersebar di lima benua, terdiri dari warganegara Indonesia dan warga bangsa-bangsa dunia yang berketurunan Indonesia. Kami merupakan komunitas-komunitas yang besar dan beragam dan terikat oleh tali hubungan dan rasa kecintaan terhadap Indonesia. Kami terdiri dari para profesional, buruh, perawat, awak kapal, insinyur, arsitek, guru, mahasiswa, politikus dan aktivitis, artis, wiraswasta, inovator, atlit, pemuka agama, pemuda, ibu rumah tangga dan banyak lagi. Kami berkumpul di Los Angeles untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dengan diaspora Indonesia di seluruh dunia, dan untuk menghubungkan sesama diaspora guna memperbaharui dan memperkuat keterikatan dengan Indonesia.

Dengan ini kami menyatakan: Kami bertekad untuk membangun sebuah komunitas global diaspora Indonesia. Untuk tujuan ini, kami membentuk Network Diaspora Indonesia. Kami bertekad untuk bersinergi dengan Indonesia. Menjawab himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kongres, dan diperkuat oleh kehadiran anggota parlemen, pemimpin masyarakat madani dan wiraswasta Indonesia, kami siap dan berkomitmen untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang dinamis untuk kesejahteraan bersama dengan Indonesia. Kami berbesar hati dengan kemajuan demokrasi, ekonomi, posisi internasional Indonesia dan budaya Indonesia yang semakin men-dunia, dan kami percaya bahwa Indonesia akan mengatasi tantangan yang masih ada, seperti memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan good governance, dan menegakkan hukum. Kami menaruh harapan tinggi pada masa depan

cerah Indonesia yang penuh potensi, dan kami terus percaya pada nilai-nilai Indonesia terbaik: toleransi dan harmoni, bhineka tunggal ika, pluralisme, dan tradisi yang menghormati lingkungan. Kami berpandangan bahwa warisan nilai-nilai yang penuh kearifan ini perlu selalu dilestarikan karena tanpa ini Indonesia akan kehilangan makna. Kami akan berupaya keras untuk bersama-sama melestarikan nilai-nilai tersebut. Kami meyakini bahwa abad ke-21 akan menjadi abad terbaik untuk Indonesia. Untuk memenuhi harapan ini, Indonesia harus percaya diri, adaptif, terbuka pada ide-ide baru, meritokratis, dan secara cerdas mengelola kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan warisan budayanya. Diaspora Indonesia akan menjadi penghubung (hub) untuk gagasan, solusi, sumber-daya dan jaringan guna membangun kesejahteraan bersama, dan kami akan menjadi suatu kekuatan untuk perdamaian dan kemajuan. Kami akan mempromosikan budaya Indonesia. Kami akan menyebarkan visi ini dan bekerjasama dengan komunitas diaspora Indonesia lainnya, dan akan berupaya untuk terus tumbuh bersama dan membantu satu sama lain. Ini merupakan babak baru bagi Indonesia, dan diaspora Indonesia. Kami mengundang semua diaspora Indonesia untuk maju bersama kami.

Los Angeles, 8 Juli 2012

Ketiga, kemampuan diplomasi. Sesuai dengan pemahaman akan kegiatan- kegiatan diaspora yang merupakan diplomasi publik di subbab sebelumnya, diaspora Indonesia jelas memiliki kemampuan diplomasi. Beberapa contoh tambahan disampaikan oleh Dino Patti Djalal yaitu, Ustad Shamsi Ali, salah satu Imam di *Islamic Centre New York*, sering memberikan penjelasan di forum-forum mengenai permasalahan islamophobia yang banyak terjadi di luar negeri. Beliau menjelaskan kepada forum posisi Islam sebagai agama rahmatan lil-alamiin, namun dirusak oleh paham-paham ekstrim yang bersembunyi di balik penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara salah (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016).

Selain itu, ada juga kejadian saat beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Saat itu, beliau perlu bertemu dengan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Kongres Amerika Serikat Ed Royce. Dengan posisi Ed Royce yang sangat berpengaruh di senat Amerika Serikat ini, sulit sekali bagi Pak Dino untuk mendapatkan jadwal bertemu. Namun karena peran diaspora, Ed Royce jadi sahabat dekat Dino Patti Djalal sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Saat masa kampanye di distrik tempat Ed Royce bertarung, di California, lawan kampanyenya keturunan Asia dan Ed Royce agak kewalahan karena California merupakan distrik dengan dominasi konstituen keturunan Asia. Namun kemudian, yang paling bersikukuh mendukung kampanye Ed Royce ini adalah diaspora Indonesia. Mereka melakukan kampanye ketok rumah, memasang spanduk-spanduk, dan lain sebagainya hingga akhirnya Ed Royce memenangkan pertarungan politik di distriknya. Karena hal tersebut, Ed Royce merasa dekat dengan Republik Indonesia, khususnya dengan Dino Patti Djalal sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, sehingga dapat bertemu kapan saja dibutuhkan (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016)

Melalui contoh-contoh di atas dapat dilihat kontribusi diaspora Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui jalur diplomasi publik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyatakan bahwa diplomasi ideal di masa depan merupakan *multitrack diplomacy* sehingga memungkinkan pelibatan peran diaspora sebagai agen diplomasi Indonesia (Kementerian Luar Negeri, wawancara, 2016)

Keempat, kemampuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus dari kegiatan-kegiatan diaspora Indonesia. Dapat dilihat dari beberapa program dari *taskforce-taskforcenya* yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi seperti penyelenggaraan program *Family Medicine or Primary Care Physicians* (FM or PCP) yang dimulai Mei 2016 lalu. Satu tim berisikan 17 pengajar PCP dari beberapa universitas di Indonesia

mengikuti workshop selama 2 minggu di Maastricht Medical Center Belanda. Kemudian pendampingan untuk kelanjutan uji coba Telemedicine di Indonesia dan upaya untuk menyediakan pelayanan dan tindakan medis bagi penduduk Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah melalui beberapa aktifitas seperti pengembangan vaksin khusus negara-negara beriklim tropis, hibah alat-alat dan instrumen kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, tindakan ortopedi, pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan khusus lansia, tim bedah plastik dan bedah umum, kanker ginekologi, kanker mulut, pelayanan kesehatan jarak jauh, lepra, kesiapan bencana alam global, akses pelayanan kesehatan bagi penduduk tak terdata. Selain itu tim *taskforce* kesehatan juga membantu pendidikan Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Anestesi untuk penduduk Indonesia melalui Universitas di Indonesia (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016)

Beberapa kegiatan lain terkait peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilakukan diaspora Indonesia melalui *taskforce livable cities* yaitu pendampingan pembuatan MRT di Jakarta, memberikan *input* terhadap penanganan banjir di Jakarta, serta program *Indonesian Waste Platform* yang menangani pengolahan limbah untuk Indonesia yang lebih bersih melalui proyek-proyeknya yang mencakup pembangunan kesadaran dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, melakukan lobi dengan pemuka masyarakat, membuat bank sampah, dan membuat inovasi seperti pembuatan kapal dengan tenaga sampah. *Taskforce* energi diaspora Indonesia juga membantu transfer ilmu pengetahuan atas pembangkit listrik dari angin dan tenaga matahari (khususnya untuk peningkatan kualitas *solar panel*) di desa-desa untuk membantu pemerataan listrik di Indonesia (Ebed Litaay, wawancara, 2016).

Kelima, kemampuan ekonomi. Peningkatan kemampuan ekonomi yang dilakukan diaspora Indonesia dengan *taskforce* bisnis dan investasi melalui IDN chapter Perth menyelenggarakan seminar dengan tema "*Starting a Product Based Business*" pada 9 April 2016. Melalui IDN

chapter Manila mengadakan kegiatan Temu Perdana Pebisnis dan Profesional Indonesia pada 16 April 2016. Melalui IDN Amerika Serikat mengadakan *Diaspora's Biz Session* dengan tema "*Learn What It Takes to Have a Successful Start-up*" pada 29 April 2016. Melalui IDN China menyelenggarakan kegiatan bersama *Indonesian-China Women Entrepreneurs* dengan tema *Holding Hand to Create a Better World* pada 10 Agustus 2016. Akan mengadakan *Indonesian Diaspora Business Conference* di Jakarta dengan agenda Kecocokan Bisnis Indonesia dan Pengusaha dari IDN *chapter* di seluruh dunia pada 10 Oktober 2016, diperkirakan 100 usaha kecil dan menengah akan berpartisipasi dalam acara ini. Seminar dan konferensi tersebut membuka jejaring bisnis baru antar sesama pebisnis diaspora Indonesia yang mungkin sebelumnya tidak terkoneksi. Kegiatan terakhir yang akan di Jakarta Oktober nanti, sekaligus menjadi pembuka jalan bagi pebisnis usaha kecil dan menengah Indonesia untuk mengeksport hasil produksinya atau mengimpor barang baku untuk produksi dalam negeri (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016)

Keenam, kemampuan sosial. Aktualisasi kemampuan ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan sosial ini juga menjamin keselamatan warga negara dari berbagai bencana. Perwujudan kemampuan sosial dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketaatan terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi pertahanan negara. Selain itu, peran media massa, sistem komunikasi, dan informasi publik dioptimalkan dalam mendukung implementasi kemampuan sosial untuk keberhasilan usaha-usaha pertahanan negara. Selain contoh kasus Ustad Shamsir Ali yang telah dijelaskan sebelumnya, diaspora Indonesia melalui taskforce pendidikan, kesehatan, dan budayanya melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan soft skill sumber daya manusia yaitu *diaspora e-class* untuk anak SD/SMP/SMA yang memberikan materi atau ceramah dalam bahasa

Inggris selama 30 menit. Program ini juga rencananya akan diperluas dengan melibatkan *taskforce-taskforce* lain dan penambahan bahasa selain Inggris seperti Mandarin dan Perancis. Ada juga kegiatan pertukaran orang Indonesia dengan orang asing guna mempelajari budaya dan bahasa sehingga dapat meningkatkan daya saing orang Indonesia untuk *survive* di negara lain dan secara global, terkait dengan mencari pekerjaan (Ebed Litaay, wawancara, 2016).

Ketujuh, kemampuan moral. Peningkatan kemampuan moral diaktualisasikan melalui komitmen kebanggaan sebagai warga negara, percaya akan masa depan bangsa yang lebih baik, setia kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, serta menegakkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Disamping itu, kemampuan moral juga diarahkan untuk membangun keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Komitmen diaspora Indonesia dalam peningkatan kemampuan moral ini dapat dilihat dengan jelas melalui isi Deklarasi Diaspora. Program-program nyata yang dilakukan juga didasarkan kepada peningkatan moral seperti teknologi untuk energi alternatif yang ramah lingkungan dan mendukung kemandirian desa sehingga warga desa bangga akan wilayah tempat tinggalnya tanpa mengharapkan mimpi semu yang ada di kota. Program Indonesian Waste Platform juga melatih rakyat Indonesia untuk sadar lingkungan dan lebih bijak dalam mengolah limbah rumah tangganya untuk lingkungan yang lebih baik (Ebed Litaay, wawancara, 2016).

Kedelapan, kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara. Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara mencakup kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana dan wilayah pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan maupun pertahanan. Pengembangan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan yang disinkronisasikan kepada seluruh wilayah secara proporsional dan seimbang guna mencapai hasil yang optimal. Melalui berbagai kegiatan-kegiatan *taskforce* kota layak huni, diaspora Indonesia

turut meningkatkan kemampuan dukungan penyelenggaraan negara dengan program-program Pembangunan Kampung Nelayan Muara Angke sebagai *masterplan* Jakarta Utara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kolaborasi dengan *Wageningen University* Belanda dan Institut Pertanian Bogor untuk studi participatory dalam perencanaan lingkungan bidang arsitektur lansekap di area Puncak, mengembangkan perangkat baru untuk meningkatkan ketahanan desa/kota masa depan di Yogyakarta. Selain itu ada juga program KerjaSamaOranye atas *Smart City* Bandung dan Surabaya dengan proyek yang sedang berjalan yaitu *Smart City Hall, Home at Work, Fashion Village*, serta pengembangan daerah Babakan di Surabaya. Ada pula rapat para pakar untuk program *Adaptive Re-use of Forts in Indonesia*, yakni pendayagunaan kembali benteng-benteng peninggalan Belanda. Bukan tidak mungkin program ini dapat menjadi cikalbakal pembangunan pertahanan perbatasan darat Indonesia. Kemudian ada *round table meeting* membahas pengembangan Kota Lama Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berkolaborasi dengan Universitas Leipzig, mengadakan penelitian untuk pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi strategi manajemen resiko banjir. Program-program tersebut secara langsung dan tidak langsung meningkatkan kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah pertahanan yang kemudian dapat didayagunakan untuk kesejahteraan dan pertahanan (Dino Patti Djalal, wawancara, 2016)